

Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pieter Leunupun¹, Grace Persulesy^{2*}, Melisa Yuliana Souhuwat³
^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia Maluku

pieterleunupun28@gmail.com, persulesygrace@gmail.com, melisasouhuwat@yahoo.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 12 Mei 2022

Disetujui : 27 Juni 2022

Dipublikasi : 7 Juli 2022

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of regional financial management and regional financial accounting systems on the quality of local government financial reports. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency in West Seram Regency. Data was collected by survey method through distributing questionnaires to respondents, namely, all staff or employees in the government agency. The results showed that regional financial management had no effect on the quality of regional financial reports. It can be concluded that regional financial management carried out in accordance with government regulations and provisions cannot guarantee the good quality of regional government financial reports. Meanwhile, the regional financial accounting system affects the quality of the regional financial statements of the West Seram Regency government. This proves that an effective regional financial accounting system will produce quality financial statement information. This means that if the regional financial accounting system is getting better, the financial reports produced will also increase. Improvements in the application of regional financial management and regional financial accounting systems need to be continuously implemented through the activities of the leadership and all local BPKAD employees, which are carried out not only incidentally and responsively to certain cases, but are continuous. The quality of financial reports in government agencies must truly meet reporting standards because the inequality will have an impact on various fields. Therefore, the reporting must really be considered so that it is in accordance with existing standards.

Keywords : Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System, Quality of Financial Reports

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah (Juwita, 2013). Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pradono dkk, 2015).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan



transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Komarasari, 2017). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2019). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2019, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan (Erlina, 2013:25). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran Normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami

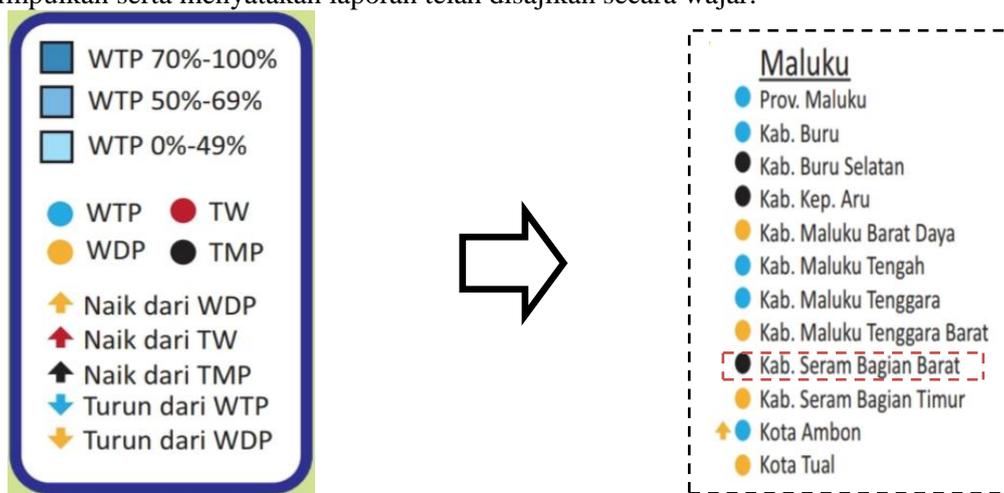
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Emeka-Nwokeji (2012) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang (UU) untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah. Tujuannya untuk memastikan dana dari rakyat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Pada semester I tahun 2018, BPK memeriksa 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari 542 pemerintah daerah (Pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2017. Pemeriksaan LKPD Tahun 2017 meliputi Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017 yang dilakukan oleh BPK tersebut menghasilkan tiga opini BPK. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai objek penelitian, adalah karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu OPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat yang di mana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang dinilai belum berhasil menyusun serta menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* (Tidak Menyatakan Pendapat) sejak tahun 2006 hingga tahun 2017 dan baru memperoleh opini WDP pada laporan keuangannya tahun 2018 lalu. Predikat TMP yang diperoleh oleh Kab.SBB selama 12 tahun itu dapat diartikan bahwa pemerintah belum menjalankan pengelolaan keuangan serta aset secara benar sesuai dengan aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan (*good governance*). Oleh sebagian akuntan, opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak dapat memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan serta menyatakan laporan telah disajikan secara wajar.



Gambar 1. Peta Opini LKPD Provinsi Maluku Tahun 2017

Sumber : www.bpk.go.id - IHPS I Tahun 2018

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya yaitu merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah daerah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Salah satu masalahnya adalah terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2016 Semester II Tahun 2018. Hasil pemeriksaan BPK yang terkait dengan pengelolaan BMD menunjukkan bahwa pengelolaan BMD tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) belum sepenuhnya efektif.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain Hanifa. L, dkk (2016) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian ini dilakukan pada SKPD di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pasha A.K pada tahun 2018 melakukan penelitian pada 18 Dinas di SKPD Kabupaten Grobogan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Defitri pada tahun 2018 melakukan penelitian tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Solok.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sama-sama mengkaji tentang pengaruh pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian, yang mana penelitian ini berlokasi pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

STUDI LITERATUR

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Menurut **Soleh dan Rohmansjah (2010:10)**, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukann untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

Akuntabilitas

Mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat serta amanah yang diterimanya baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat

Value for Money

Merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik yang didasari pada konsep *value for money*, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik.

Apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah baik, hal ini dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah buruk maka dapat menjadi salah satu faktor penurunan kualitas dari laporan keuangan daerah tersebut. Menurut **Defitri (2018)** pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggiterhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) maupun masyarakatserta dapatdibandingkan antaraanggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dengan yang dicapai. Berdasarkan referensi yang digunakan diatas maka hipotesis yang dapat digambarkan adalah:

H₁: **Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan suatu Negara maupun daerah, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomiyang semakin besar dan beragam. Menurut **Halim (2004)** mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) sistem akuntansi keuangan daerah adalah: Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatann, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Terkait dengan kualitas laporan keuangan, terdapat beberapa pernyataan yang menggambarkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yaitu: Menurut **Bastian (2007)** mengemukakan: Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Menurut **Mardiasmo (2009)**, menyatakan: Untuk mendapatkan

hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. **Mulyanto** dalam **Nurillah dan Muid (2014)**, menyatakan bahwa: Pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dinilai lebih memberi manfaat dalam memberikan informasi yang lebih lengkap, informasi yang lebih lengkap ini akan mendukung pemerintah daerah saat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi keuangan daerah ini juga mampu menghasilkan informasi guna penyusunan laporan keuangan yaitu informasi mengenai kas dan entitas selain kas sesuai SAP yang berlaku tentang laporan keuangan yang lebih komprehensif. Artinya, apabila sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan efektif, maka akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

H₂: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (**Rahma et al, 2019**). Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan berkualitas yang dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)* dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan uji Regresi Berganda. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak 36 orang. Alasan menggunakan BPKAD sebagai objek penelitian, adalah karena BPKAD bertanggungjawab terhadap pengendalian sekaligus pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini dilakukan melalui penggunaan data primer yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden, melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pejabat struktural (bagian sekretariat) dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan (Staf/pegawai) pada BPKAD Kab.SBB. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan kabupaten Seram Bagian Barat. Jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner berpedoman pada skala Likert. Skor 1-5 digunakan untuk mengukur jawaban responden, dimana pernyataan yang bersifat sangat setuju diberi skor 5 dan untuk

pernyataan yang bersifat tidak setuju diberi skor 1. Adapun variabel dan defenisi operasional dan indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep dan Definisi Operasional	Indikator
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat Dipahami
Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁)	Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah	1. Akuntabilitas 2. <i>Value for money</i> 3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik 4. Transparansi 5. Pengendalian
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisikeuangan dan operasi pemerintah	1. Pencatatan 2. Pengelolaan dan Pengikhtisaran 3. Pelaporan

Sumber : Defitri (2018)

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Dependen);
- a = Konstanta;
- b = Koefisien regresi;
- X₁ = Pengelolaan Keuangan Daerah;
- X₂ = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
- e = Standar eror.

HASIL

Dari 36 kuesioner yang telah disebarkan kepada responden maka diperoleh tingkat respon (*respond rate*) adalah 100% yang berarti pengujian layak untuk dilanjutkan. Karakteristik 36 responden dalam penelitian ini meliputi; jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan masa kerja seperti yang tertera pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	16	44
Perempuan	20	56
Jumlah	36	100
Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
>25-30	18	50
>30-40	14	39

>40-50	4	11
>50	0	0
Jumlah	36	100
Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SMU	5	14
D3	9	25
S1	20	56
S2	2	5
Jumlah	36	100
Masa Kerja (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
<10	12	33
11-20	15	42
21-30	9	25
>30	0	0
Jumlah	36	100

Sumber ; Data diolah, 2019

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam penelitian ini lebih banyak adalah responden perempuan yakni 20 orang, begitu juga dengan usia lebih banyak berusia lebih dari 25 tahun sampai dengan 30 tahun yakni sebanyak 18 orang. Data tabel 2 juga menunjukkan bahwa rata-rata responden telah berpendidikan tinggi karena mayoritasnya berpendidikan S1 yakni sebanyak 20 orang dengan masa kerja mayoritas 11-20 Tahun sebanyak 15 Orang.

Berikut ini merupakan tabel distribusi jawaban responden pada masing-masing indikator berdasarkan faktor pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, serta kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 3 Skor Jawaban Responden (Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pertanyaan	Min	Max	Kriteria Pernyataan										Rata - Rata Skor
			SS		S		RR		KS		TS		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
AKUNTABILITAS													
P1	4.00	5.00	15	41.7%	21	58.3%	-	-	-	-	-	-	4.41
P2	2.00	5.00	12	33.3%	21	58.3%	-	-	3	8.3%	-	-	4.17
Rata-Rata Indikator Akuntabilitas												4.29	
VALUE FOR MONEY													
P3	4.00	5.00	11	30.6%	25	69.4%	-	-	-	-	-	-	4.31
P4	2.00	5.00	13	36.1%	9	52.8%	-	-	4	11.1%	-	-	4.14
Rata-Rata Indikator Value For Money												4.22	
KEJUJURAN DALAM MENGELOLA KEUANGAN PUBLIK													
P5	2.0	5.00	8	22.2	2	63.9	-	-	5	13.9	-	-	3.94

	0			%	3	%				%			
P6	2.0 0	5.00	6	16.7 %	2 4	66.7 %	2	5.6%	4	11%	-	-	3.89
Rata-Rata Indikator Kejujuran Dalam Mengelola Keuangan Publik													3.91
TRANSPARANSI													
P7	1.0 0	5.00	8	22.2 %	1 3	36.1 %	5	14%	7	19.4 %	3	8.3 %	3.44
P8	2.0 0	5.00	7	19.4 %	2 2	61.1 %	5	13.9 %	2	5.6%	-	-	3.92
Rata-Rata Transparansi													3.68
PENGENDALIAN													
P9	4.0 0	5.00	1 2	33.3 %	2 4	66.7 %	-	-	-	-	-	-	4.33
P10	4.0 0	5.00	9	25%	2 7	75%	-	-	-	-	-	-	4.25
Rata-Rata Indikator Pengendalian													4.29
RATA-RATA KESELURUHAN													4.08

Sumber: Data diolah, (2019)

Nilai rata-rata keseluruhan variabel pengelolaan keuangan daerah adalah 4.08. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan nilai rata-rata setiap indikator dalam tabel diatas, dapat dilihat nilai rata-rata indikator yang paling tinggi terkait dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan secara efektif dalam laporan keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah indikator akuntabilitas dan pengendalian. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas dan pengendalian sangat penting bagi setiap daerah untuk melaksanakan pertanggungjawaban suatu laporan keuangan daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tersebut.

Tabel 4 Skor Jawaban Responden (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Pertanyaan	Min	Max	Kriteria Pernyataan										Rata-Rata Skor
			SS		S		RR		KS		TS		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
PENCATATAN													
P1	4.00	5.00	10	27.8%	25	69.4%	1	2.8%	-	-	-	-	4.25
P2	2.00	5.00	8	22.2%	26	72.2%	2	5.6%	-	-	-	-	4.17
P3	4.00	5.00	7	19.4%	28	77.8%	1	2.8%	-	-	-	-	4.17
P4	2.00	5.00	7	19.4%	29	80.6%	-	-	-	-	-	-	4.19
P5	5.00	4.00	10	27.8%	26	72.2%	-	-	-	-	-	-	4.28
Rata-Rata Indikator Pencatatan													4.21
PENGGOLONGAN ATAU PENGKLASIFIKASIAN													
P6	3.00	5.00	10	27.8%	25	69.4%	1	2.8%					4.25
P7	3.00	5.00	10	27.8%	25	69.4%	1	2.8%					4.25
P8	4.00	5.00	9	25%	27	75%	-	-	-	-	-	-	4.25
Rata-Rata Indikator Penggolongan atau Pengklasifikasian													4.25
PELAPORAN													
P9	3.00	5.00	8	22.2%	27	75%	1	2.8%	-	-	-	-	4.19
P10	3.00	5.00	9	25%	26	72.2%	1	2.8%	-	-	-	-	4.22
P11	3.00	5.00	6	16.6%	29	80.6%	1	2.8%	-	-	-	-	4.14
P12	4.00	5.00	7	19.4%	29	80.6%	-	-	-	-	-	-	4.19
Rata-Rata Indikator Pelaporan													4.18

RATA-RATA KESELURUHAN	4.21
------------------------------	-------------

Sumber: Data diolah, (2019)

Nilai rata-rata keseluruhan variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah 4.21. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa prosedur-prosedur suatu sistem akuntansi keuangan daerah perlu diterapkan dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan nilai rata-rata setiap indikator dalam tabel diatas, dapat dilihat nilai rata-rata indikator yang paling tinggi terkait dengan prinsip sistem akuntansi keuangan daerah yang harus diterapkan secara efektif dalam laporan keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah indikator pencatatan dan penggolongan/pengklasifikasian. Hal ini membuktikan bahwa pencatatan dan penggolongan/pengklasifikasian sangat penting dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tersebut.

Tabel 6 Skor Jawaban Responden (Kualitas Laporan Keuangan Daerah)

Pertanyaan	Min	Max	Kriteria Pernyataan										Rata - Rata Skor
			SS		S		RR		KS		TS		
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
RELEVAN													
P1	4.00	5.00	10	27.8%	26	72.2%	-	-	-	-	-	-	4.28
P2	4.00	5.00	9	25%	27	75%	-	-	-	-	-	-	4.25
P3	3.00	5.00	12	33.3%	23	63.9%	1	2.8%	-	-	-	-	4.31
P4	4.00	5.00	11	30.6%	25	69.4%	-	-	-	-	-	-	4.31
Rata-Rata Indikator Relevan												4.29	
ANDAL													
P5	3.00	5.00	9	25%	26	72.2%	1	2.8%	-	-	-	-	4.22
P6	2.00	5.00	4	11.1%	28	77.8%	4	11.1%	8	22.2%	-	-	3.56
P7	1.00	5.00	4	11.1%	17	47.2%	3	8.3%	12	33.3%	1	2.8%	3.28
Rata-Rata Indikator Andal												3.69	
DAPAT DIBANDINGKAN													
P8	4.00	5.00	10	27.8%	26	72.2%	-	-	-	-	-	-	4.28
P9	3.00	5.00	10	27.8%	25	69.4%	1	2.8%	-	-	-	-	4.25
Rata-Rata Indikator Dapat Dibandingkan												4.26	
DAPAT DIPAHAMI													
P10	4.00	5.00	10	27.8%	26	72.2%	-	-	-	-	-	-	4.25
P11	3.00	5.00	7	19.4%	28	77.8%	1	2.8%	-	-	-	-	4.06
Rata-Rata Indikator Dapat Dipahami												4.15	
RATA-RATA KESELURUHAN												4.09	

Sumber: Data diolah, (2019)

Nilai rata-rata keseluruhan variabel kualitas laporan keuangan daerah adalah 4.09 yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dinilai sebagai laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan nilai rata-rata setiap indikator dalam tabel diatas, dapat dilihat nilai rata-rata indikator yang paling tinggi terkait dengan karakteristik kualitas laporan keuangan daerah yang harus diterapkan secara efektif dalam laporan keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah indikator relevan dan dapat dibandingkan. Hal ini membuktikan bahwa relevan dan dapat dibandingkan sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu daerah.

Dari hasil uji instrumen yang pertama yaitu uji validitas diketahui semua variabel dinyatakan valid karena didapatkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai *r* tabel yaitu 0,329 dengan taraf signifikan 5%. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh hasil *Cronbach's Alpha* > 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah hasilnya reliabel sehingga dapat dikatakan layak. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai *tolerance / variance inflation factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* $\geq 0,1$ / *VIF* ≤ 10 , maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *glejser* tingkat signifikansi variabel bebas $\geq 0,05$ yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda, model ini terdiri dari dua(2) variabel bebas yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X_2) dan satu variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	8.186	5.843		1.401	.171
Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1)	-.140	.166	-.109	-.847	.403
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X_2)	.844	.126	.869	6.723	.000

a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan (Y)

Sumber: Data diolah, (2019)

Berdasarkan pada Tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda adalah :

$$Y = 8,186 - 0,140 X_1 + 0,844 X_2 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut Nilai konstanta sebesar 8,186 artinya bahwa jika variabel pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah adalah nol, maka nilai Kinerja Karyawan adalah sebesar konstanta 8,186. Koefisien regresi variabel X_1 (Pengelolaan Keuangan Daerah) diperoleh sebesar (-0,140), artinya variabel pengelolaan keuangan daerah memberikan kontribusi negatif atau berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu sebesar (-0,140) atau (-14%). Hal ini berarti bila

pengelolaan keuangan daerah meningkat sebesar kelipatan satu satuan, maka tidak akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Koefisien regresi variabel X_2 (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) diperoleh sebesar 0,844 artinya variabel sistem akuntansi keuangan daerah memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu sebesar 0,844 atau 84,4%. Hal ini berarti bila sistem akuntansi keuangan daerah meningkat sebesar kelipatan satu satuan, maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah dan ikut meningkat yaitu sebesar 84,4.

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hasil pengujian variabel pengelolaan keuangan daerah (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-0,847 < 2,034$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,403 > 0,05$. Sedangkan hasil pengujian variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,723 > 2,034$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah belum tentu dapat menjamin bagusnya kualitas laporan keuangan pemerintah suatu daerah. Ketidaksignifikan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat disebabkan terdapat faktor lain tentang pelaporan keuangan yang tidak dijelaskan dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang hanya menjelaskan suatu kebijakan yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal, memiliki integritas yang tinggi sehingga perlu dilakukan evaluasi antara APBD yang dianggarkan dengan yang dicapai untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh **Defitri (2018)**. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh **Pasha (2018)** yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengiktisaran dan pengolnggan dengan melakukan posting jurnal ke dalam buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal akan mampu memberi dukungan kuat pada kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian (**Defitri, 2018; Hanifa. L, 2016**) yang meninformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah tidak dapat menjamin bagusnya kualitas laporan keuangan pemerintah suatu daerah.

Sementara itu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, dan membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan daerah di dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan dokumen Badan Pengelola Keuangan yang berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II Tahun Anggaran 2018, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) pada tahun 2017. Hal ini diakibatkan dokumen Badan Pengelola Keuangan berupa IHPS I dan II Tahun Anggaran 2019 yang merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan pada tahun 2018 lalu, belum diunggah secara resmi pada situs BPK. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini dalam mengukur pengelolaan keuangan daerah serta sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah hanya sebatas pada beberapa variabel saja sementara variabel lain yang tidak diteliti relatif cukup banyak, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan serta sistem Informasi Keuangan daerah.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. IHPS I. (2018). <https://www.bpk.go.id/ihps/2019/06/android.html> [June 6, 2019].
- Bastian, Indra. (2007). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Defitri, dan Siska Y. (2018), *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Jurnal Benefita, Vol.3, No.1. E-ISSN:2477-7862
- Emeka-Nwokeji, N. A. (2012). Repositioning accounting information system through effective data quality management: A framework for reducing costs and improving performance. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 1(10), 86-94.
- Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifa, L., Wawo, A. B., dan Husin D. (2016). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1 No.2.
- Juwita, Rukmi. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Trikonomika*, Vol.12, No.2. ISSN:1411-514X.
- Komarasari, W. (2017). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Prodi Akuntansi UPY*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2019). *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Nurillah, A.S dan D.Muid. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang*.

- Pasha dan A Kamal. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistim Pengendalian Intern dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Grobogan). Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Pradono, Febrian Cahyo dan Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22, No.2. ISSN: 1412-3126.
- Rahma, A. A., Lusiana, L., & Indriani, P. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Size Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Benefita*, 4(2), 210-220.
- Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru, (2010), *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Fokus media.